

ANALISIS ELASTISITAS DAN TINGKAT KESULITAN. REALISASI PENERIMAAN SUMBER KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

Nano Prawoto

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

nanopra@yahoo.com

Abstract

This research focuses on measurement aspect of elasticity and difficulty rate of local receipt realization in Sleman Regency. The analysis which developed is regression model by partial adjustment model (PAM). The result of this study shows that the elasticity of all models more than 1 ($E > 1$) or elastic. It means that local finance interdependence on central payment in long term is relatively decrease, assumed there is an economic growth (GDRB). This study concludes that k coefficient ≥ 1 or close to zero means the difficulty rate is relatively high, because it can not operate the local receipt planning as the target. It is shown that local receipt administration relatively bad. So that this research recommended that the local government have to increase an economic growth for increasing the local receipt, and an improvement on professionalism of human resources.

Keywords : local receipt, elasticity, GDRP, Partial adjustment model

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang di tempuh bangsa Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 7 % pertahun. Pembangunan ekonomi tersebut dimulai sejak sejak Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) tahun 1969 yang lalu, dan proses pembangunan berjalan mulus hingga tahun 1970-an dan 1980-an, namun demikian tampaknya pembangunan ekonomi Indonesia tersebut juga beberapa kali telah

mengalami *external shocks* seperti harga minyak mentah turun di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar Yen terhadap dollar Amerika Serikat selama tahun 1980-an dan yang paling parah adalah saat terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 yang lalu pembangunan ekonomi Indonesia terasa terhenti dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif sampai 13 %.

Krisis ekonomi dan politik bangsa Indonesia sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun dan tanda-tanda perbaikan tampaknya sudah mulai kelihatan, meskipun belum dapat dikatakan sangat

optimis. Kondisi ekonomi dan keadaan politik secara keseluruhan relatif agak stabil dan terkendali, walaupun masih ada pula beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Sementara agenda reformasi politik dan ekonomi terus berjalan, arah kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk makin memberikan otonomi kepada daerah makin terus didorong. Hal ini dengan maksud untuk menumbuhkan daerah agar dapat mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri. Kebijakan itu tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2003 dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang tersebut memberikan perspektif baru dalam manajemen makroekonomi yang diharapkan oleh semua pihak untuk dapat segera direalisasikan.

Melihat potret masa lalu sampai pada saat ini tampaknya ada dua sumber persoalan yang telah menjadikan daerah dalam posisi selalu bergantung kepada pemerintah pusat. *Pertama*, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 5/1974) dan *kedua*, adalah sistem atau mekanisme alokasi keuangan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dengan munculnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, daerah mempunyai peluang emas untuk berkembang pesat sekaligus mendapat tantangan untuk membenahi ketimpangan (*inequality*) yang terjadi

di antara beberapa wilayah selama ini. Ketimpangan regional sendiri sebenarnya sebagai konsekuensi yang alami dari adanya pembangunan dan derajat ketimpangan itu akan berubah dengan adanya pembangunan itu sendiri (Ardani, 1992).

Namun peluang itu hanya akan mempunyai arti bagi daerah, apabila daerah itu sendiri mau dan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Dan sebaliknya menjadi sebuah persoalan baru, khususnya bagi wilayah yang secara ekonomi kurang layak untuk berdiri sendiri. Sehingga, persoalan yang kedua ini jika tidak ditangani dengan baik justru akan makin menyebabkan ketimpangan antar daerah yang makin besar. Di dalam teori pembangunan regional sendiri memang akan selalu ada *trade-off* antara efisiensi ekonomi dengan pemerataan pendapatan antar daerah atau *interregional income equality* (Mera, 1975)

Salah satu penyebab ketimpangan regional adalah kebijakan pembangunan yang terpusat, sehingga salah satu cara untuk meminimalisasi ketimpangan regional adalah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya (otonomi daerah). Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan spesialisasi ekonomi daerah, atau biasa disebut dengan spesialisasi regional. Fenomena spesialisasi regional ini telah menimbulkan ketertarikan yang sangat besar di antara para ekonom (terutama ekonom regional), ahli geografi dan sejarawan. Sejak Adam Smith menulis

Wealth of Nations (1776), spesialisasi regional dihubungkan dengan pembangunan regional dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1817, para ekonom mulai mengembangkan teori spesialisasi regional dan perdagangan internasional (*Ohlin, 1933; Krugman, 1991*), serta Thunen (seorang ahli regional) mengembangkan teori lokasi industri (*Weber, 1929*).

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman merupakan tantangan yang cukup berat jika dilihat dari sisi struktur keuangan daerahnya. Sumber penerimaan daerah tersebut kalau kita lihat pada struktur pendapatannya, ternyata sumber penerimaan keuangan daerah masih didominasi oleh pos sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan yang persentasenya lebih dari 65%, sedang pos pendapatan asli daerah (PAD) hanya memberi kontribusi sebesar lebih kurang 25%. Namun demikian untuk pos penerimaan dari PAD menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sedang penerimaan dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan menunjukkan kecenderungan yang menurun.

Melihat struktur penerimaan daerah di atas, maka propinsi Kabupaten Sleman perlu melakukan perhitungan dengan matang terhadap potensi penerimaan pada bagian RAPBD-nya, karena anggaran belanja merupakan muara dari unsur pendukung program pengembangan wilayah. Dengan undang-undang otonomi ini, kita ketahui bersama

bahwa Kabupaten Sleman secara umum tidak mempunyai penerimaan dari sumber daya alam, terutama sektor pertambangan minyak dan gas alam. Dengan demikian yang menjadi andalan pendapatan daerah untuk Kabupaten Sleman adalah dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Potensi lain yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan otonomi daerah adalah potensi sumber daya manusia yang ada. Secara kasar sumber daya manusia di Kabupaten Sleman tampaknya cukup memadai, untuk menjalankan fungsi-fungsi birokrasi secara profesional. Namun demikian, kondisi aparat maupun perangkat kelembagaan yang ada masih perlu ditinjau dan dianalisis lebih mendalam, terutama menyangkut implementasi otonomi daerah di tingkat kecamatan dan desa, karena arah kebijakan pembangunan daerah sekarang ini akan dikembangkan di tingkat kecamatan-kecamatan yang menjadi basis atau pusat pertumbuhan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sleman dan sektor-sektor yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perlu dicermati kembali, sektor mana yang menjadi andalan daerah, menjadi unggulan untuk dikembangkan, sehingga kecamatan dan kabupaten menjadi pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, ada pertanyaan sejauhmana perubahan PDRB telah memberikan pengaruh kepada pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), pendapatan asli daerah

(PAD), yang semasa otonomi daerah ini menjadi andalan daerah dalam menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berapa besar nilai elastisitas dari sumber penerimaan keuangan daerah tersebut, dengan tingkat kesulitan realisasi sumber penerimaan keuangan daerah berkaitan dengan perubahan PDRB. Untuk menjawab hal tersebut perlu melakukan penelitian dengan judul "Analisis Elastisitas Dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman"

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan persoalan-persoalan disebutkan di atas tadi, dalam studi ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Berapa besar koefisien elastisitas Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman Tahun 1991 – 2003.
2. Berapa besar tingkat kesulitan realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman Tahun 1991 – 2003.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah di atas, maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perpajakan dan sumber

penerimaan keuangan daerah lainnya di Kabupaten Sleman periode 1991 – 2003. Dan untuk mencapai maksud tersebut, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui tingkat kepekaan (elastisitas) dari perubahan PDRB terhadap perubahan penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui tingkat kesulitan realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat, terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan dan menggali potensi keuangan daerah di Kabupaten Sleman, dan manfaat yang lain sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, dapat menambah wawasan pengembangan ilmu ekonomi publik, khususnya berkaitan dengan pengembangan ilmu ekonomi keuangan daerah.
2. Dapat digunakan sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan khususnya dalam aspek keuangan daerah di daerah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tahun-tahun mendatang ini agenda pembangunan ekonomi daerah akan didominasi oleh program desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Tujuan program ini jauh lebih luas dari pembangunan ekonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan rasa keadilan, mengembangkan partisipasi rakyat dan suatu sistim sosial-politik yang demokratis, serta untuk menjaga dan memperkokoh kesatuan bangsa. Pola desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat memenuhi semua tujuan itu tidak mudah untuk dirancang. Tujuan-tujuan di atas ingin ditampung dalam UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. Dalam berbagai masih terdapat berbagai kerancuan dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kerancuan terlihat dari meningkatnya keraguan untuk memberikan otonomi pada daerah Tingkat II.

Pengalihan kewenangan ke Tingkat II menjanjikan pengembangan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pembangunan sistim yang semakin demokratis. Tetapi otonomi di Tingkat II untuk beberapa tahun mendatang, mungkin sampai 10 tahun, belum tentu menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien karena pengembangan kebijakan dan pembangunan kelembagaan dan kemampuan di banyak daerah Tingkat II akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Lemahnya pengembangan kebijakan serta kelembagaan dan kemampuan di

daerah sangat tampak dari minimnya prakarsa di daerah dan usulan-usulan yang datang dari daerah untuk melaksanakan program desentralisasi dan otonomi daerah. Di waktu lalu pembangunan daerah digagaskan dan dilaksanakan terutama oleh pusat. Kini terdapat bahaya bahwa proses desentralisasi juga akan diselenggarakan secara tersentralisasi.

Peranan pusat mungkin akan tetap besar dalam bidang fiskal. Arsitektur fiskal pola lama sangat timpang secara vertikal walaupun cukup seimbang secara horizontal. Dorongan untuk merombak arsitektur ini sangat masuk akal tetapi bila tidak dirancang dengan baik bisa menghasilkan arsitektur fiskal yang kurang timpang secara vertikal tetapi penuh dengan ketimpangan secara horizontal. Suatu keseimbangan vertikal dan horizontal merupakan prasyarat bagi terjaganya kesatuan bangsa. Dalam rancangbangun baru peranan pusat untuk menjaga keseimbangan horizontal itu dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang mungkin akan tetap besar selama 10 tahun mendatang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu pencerminan kemampuan daerah, tetapi keragaman yang besar dalam kemampuan itu sudah menunjukkan bahwa selain masalah sequencing dalam desentralisasi dan pemberian otonomi juga perlu dirancang pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Data-data untuk tahun 1996 menunjukkan bahwa secara rata-rata

PAD untuk 53 kotamadya mencapai sekitar 22,4% dari total penerimaan sedangkan PAD untuk 232 kabupaten mencapai 10,3%. Suatu pemetaan berdasarkan PDRB per kepala dan PAD sebagai persen dari total penerimaan menunjukkan bahwa dari jumlah kabupaten tersebut hanya 17 kabupaten (4 di luar Jawa dan Bali) mempunyai PAD dan PDRB per kepala di atas rata-rata, sedangkan 103 kabupaten mempunyai PAD dan PDRB per kepala di bawah rata-rata. Untuk ke 53 kotamadya, hanya 8 kotamadya (semua di Jawa dan Bali) yang mempunyai PAD dan PDRB per kepala di atas rata-rata, sedangkan sebanyak 26 atau sekitar 50 persen, berada di bawah rata-rata.

Program desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pekerjaan besar dan harus berhasil dengan baik. Melihat keragaman kemampuan maka pelaksanaannya harus didasarkan pada sequencing yang jelas dan penerapan bertahap menurut kemampuan daerah. Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Maka sangat mungkin diperlukan suatu kesepakatan baru. Proses desentralisasi tidak perlu diakselerasi, namun yang perlu diakselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah — khususnya daerah Tingkat II. Ini merupakan kerja nasional yang

harus mendapat prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien. (Hadi Soesastro, 2000)

Elastisitas Sumber Keuangan Daerah

Kegiatan pembangunan suatu negara (atau daerah) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan itu perkembangan sektor pemerintah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatannya. Hal ini bila diperhatikan dari struktur APBD, keuangan daerah menjadi alat fiskal pemerintah daerah dalam menunjang kegiatan-kegiatan relokasi sumber ekonomi, meratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas sosial politik.

Dasar pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sumber keuangan daerah mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah. Dalam struktur APBD di Kabupaten Sleman, dari sisi penerimaan telah mendukung pembiayaan khususnya pengeluaran rutin, meskipun masih relatif rendah bila dilihat dari indeks kemampuan rutinnya (IKR). Rendahnya IKR ini memcerminkan pula relatif rendahnya kinerja Pemda dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah. Ini menunjukkan bahwa jenis pungutan penerimaan keuangan di Kabupaten Sleman juga relatif rendah. Sulit dipahami bila jenis pungutan tergolong

mempunyai kinerja relatif rendah, tanpa melalui proses pengukuran. Gemmel (1994: 391), mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang sering digunakan untuk mengukur pajak dan bagaimana hubungannya dengan pembangunan, digunakan parameter elastisitas dan *bouyancy*. Keduanya menunjukkan ukuran respon pajak dan penerimaan daerah terhadap perubahan PDRB dan penerimaan daerah tahun sebelumnya ($t-1$). Pengukuran elastisitas mengukur perubahan penerimaan daerah terhadap perubahan PDRB tanpa ada aksi-aksi diskresioner. Sedang *bouyancy* termasuk ada aksi-aksi diskresioner tersebut. Aksi-aksi diskresioner dimaksud mencakup perubahan resmi tarif pajak (*tax rate*) atau dasar pajak (*tax base*), pengenaan pajak (atau pungutan) baru, dan upaya-upaya administrasi. Karena pendekatan untuk membandingkan aksi-aksi diskresioner sebagai determinan dari struktur sumber penerimaan daerah relatif sulit untuk mengungkap kemampuan dan kinerja dari sumber penerimaan daerah, karena keterbatasan daerah dalam memperluas pajak dan retribusi baru. Oleh karena itu *bouyancy* dalam penelitian ini dianggap sama dengan elastisitas. Sehingga elastisitas yang dihasilkan adalah elastisitas bruto. Dengan menggunakan persamaan *Adjustment Equation Model*, akan diperoleh nilai koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian yang diadaptasikan untuk mengetahui ukuran tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah.

Wirasasmita (1982 :18 dan 1994:7-9) memberi pendekatan untuk mengetahui kedua parameter tersebut. Dengan pendekatan *Adjustment Equation Model* dapat mengetahui elastisitas dan koefisien penyesuaian secara bersamaan. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\ln R_t = \ln(kb_1) + (kb_2) \ln Y_t + (1-k) \ln R_{t-1} + \ln(kV_t + U_t)$$

Atau

$$\ln R = \ln a_0 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1}$$

Dimana :

a_1 = Menunjukkan koefisien elastisitas bruto (E)

$a_2 = 1 - k$: koefisien penyesuaian $k = 1 - a_2$, dimana k menunjukkan tingkat kesulitan

Penelitian ini juga menggunakan model seperti di atas. Dari persamaan tersebut dapat diketahui koefisien elastisitas (a_1) dan koefisien penyesuaian (k) untuk mengetahui tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah. Selanjutnya dapat pula diketahui tingkat keterlambatan pemungutan dalam satuan waktu tahun, bulan dan hari.

Parameter pengukuran tingkat elastisitas dirumuskan sebagai berikut: Jika $E > 1$, *elastis* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *semakin berkurang*, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang progresif.

Jika $E < 1$, *inelastis* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *semakin bertambah*, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah kurang responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang regresif.

Jika $E = 1$, *unitary* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *tidak berubah*, atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah relatif tidak responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang proporsional.

Parameter pengukuran tingkat kesulitan dirumuskan sebagai berikut:

Jika $k \leq 1$, atau mendekati satu artinya tingkat kesulitan *relatif rendah*, karena telah dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang *relatif semakin berkurang*. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif baik.

Jika $k \geq 0$, atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan relatif tinggi, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber

keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang *relatif semakin bertambah dan besar*. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik.

HIPOTESIS

Berdasarkan gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran di atas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga perubahan penerimaan penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya di Kabupaten Sleman semakin besar sebagai akibat dari perubahan PDRB atau koefisien $E > 1$ yaitu sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif semakin berkurang.
2. Diduga tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah di Kabupaten Sleman relatif rendah (sedang), dengan koefisien $k > 1$ atau telah dapat merealisasikan penerimaan dari target yang direncanakan yang menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup variabel-variabel pokok dari struktur penerimaan daerah seperti : penerimaan Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lainnya, dengan rentang waktu penelitian pada Tahun 1994 – 2004, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dan bersumber dari : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I (BPS Jakarta), BPS Kabupaten Sleman. (BPS Daerah), Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah (BI Yogyakarta), Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi DIY (BI Yogyakarta), Dan lain-lain data yang mendukung. Data PDRB yang digunakan adalah data dari tahun 1994 – 2004, alasan dipilihnya tahun 1994 adalah karena pada tahun tersebut perekonomian Indonesia mengikuti negara-negara yang dijuluki macan Asia, yaitu seperti Jepang, Korea, Singapura, Taiwan dan Hongkong. Sedangkan alasan tahun 2004 dipilih sebagai data akhir penelitian dikarenakan alasan teknis semata.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis kepekaan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan Kabupaten Sleman. Untuk keperluan

tersebut digunakan metode regresi. Selain itu digunakan pula analisis perbandingan untuk mendapatkan nilai proporsi penerimaan daerah terhadap pengeluaran. Dengan formulasi *Adjustment Equation Model* yang digunakan untuk mengetahui koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian yang diadaptasikan untuk mengetahui tingkat kesulitan realisasi sumber penerimaan pada struktur keuangan daerah, dan dapat diketahui pula tingkat keterlambatan pungutan. Spesifikasi model dalam penelitian ini didasarkan pada model yang telah dibangun oleh Mansfield (1972) dan Wirasmita (1982) dan dimodifikasi dalam *Adjustment Equation Model* (1994:7-9).

Model awal adalah sebagai berikut:

$$\ln T = \ln K + E \ln Y \quad [1]$$

Dimana :

T = Penerimaan pajak

Y = PDRB

K = Konstanta

E = Koefisien elastisitas

Kemudian diubah dalam persamaan sebagai berikut :

$$R^*_t = b_1 + b_2 Y_t + U_t \quad [2]$$

Dimana :

R^*_t = Penerimaan pajak yang diinginkan pada tahun t

Y_t = PRDB pada tahun t

Karena R^* , dianggap fungsi linier dari Y_t (PDRB), dan tidak dapat diobservasi. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan *Adjustment Equation*, sebagai berikut :

$$R_t - R_{t-1} = k(R_t^* - R_{t-1}) + V_t; 0 \leq k \leq 1 \quad [3]$$

dimana :

$R_t - R_{t-1}$ = Penerimaan pajak yang dapat direalisasikan

$R_t^* - R_{t-1}$ = Penerimaan pajak yang diinginkan

k = Koefisien penyesuaian (=tingkat kesulitan)

Apabila kita substitusikan persamaan [2] ke dalam persamaan [3] maka akan diperoleh persamaan berikut :

$$R_t - R_{t-1} = k[(b_1 + b_2 Y_t - U_t) - R_{t-1}] + V_t \quad [4]$$

Persamaan [4] tersebut dibagi dengan : R_{t-1} menjadi :

$$\frac{R_t}{R_{t-1}} - \frac{R_{t-1}}{R_{t-1}} = \frac{k(b_1 + b_2 Y_t - U_t)}{R_{t-1}} - \frac{k R_{t-1}}{R_{t-1}} + \frac{V_t}{R_{t-1}} \quad [5]$$

$$\frac{R_t}{R_{t-1}} - 1 = \frac{k(b_1 + b_2 Y_t - U_t)}{R_{t-1}} - k + \frac{V_t}{R_{t-1}} \quad [6]$$

Persamaan [6] dikalikan dengan :

R_{t-1}

$$R_t - R_{t-1} = k b_1 + k b_2 Y_t + k U_t + (1-k) R_{t-1} + V_t \quad [7]$$

Atau dapat dituliskan :

$$R_t = k b_1 + k b_2 Y_t + (1-k) R_{t-1} + (k U_t + V_t) \quad [8]$$

Atau dalam bentuk *Cobb Douglass* dituliskan :

$$R_t = k b_1 Y_t^{k b_2} R_{t-1}^{(1-k)} + (k U_t + V_t) \quad [9]$$

Persamaan [9] tersebut dapat ditulis kembali :

$$\ln R_t = \ln(k b_1) + (k b_2) \ln Y_t + (1-k) \ln R_{t-1} + \ln(k U_t + V_t) \quad [10]$$

Atau dapat diringkas :

$$\ln R_t = \ln a_0 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1} \quad [11]$$

Dimana :

$$a_2 = 1 - k$$

$$k = 1 - a_2$$

Nilai k antara $0 \leq k \leq 1$

Dengan demikian dari persamaan [11] tersebut diperoleh nilai koefisien elastisitas (a_1) dan nilai *adjustment equation* (koefisien penyesuaian) k . Kemudian untuk mendapatkan tingkat keterlambatan pemungutan (dalam satuan tahun, bulan dan hari) kembali ke persamaan [10] dengan cara $(1-k)/k$ atau a_2/k .

Keterangan :

R_t = Penerimaan pajak

Y_t = PDRB

R_{t-1} = Penerimaan pajak pada tahun sebelumnya

a_1, a_2 = Koefisien regresi (E)

k = Koefisien penyesuaian (tingkat kesulitan)

V_t, U_t = Variabel pengganggu

Nilai koefisien elastisitas (a_1), yang diartikan sebagai perubahan penerimaan sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan perubahan pendapatan regional (PDRB). Tingkat kesulitan (k) dapat diestimasi : apabila k mendekati atau sama dengan satu berarti tingkat kesulitan relatif rendah, karena telah dapat merealisasikan rencana (target) penerimaan, sebaliknya jika mendekati atau sama dengan nol berarti tingkat kesulitan relatif tinggi. Karena tidak bisa merealisasikan target penerimaan yang direncanakan. Sebagai ukuran interpretasi nilai k tersebut dibagi menjadi tiga kualifikasi tingkat kesulitan sebagai berikut :

Nilai k	Intepretasi
0% - 49%	Mempunyai tingkat kesulitan relatif sangat tinggi dari target penerimaan yang direncanakan
50% - 74%	Mempunyai tingkat kesulitan relatif sedang (cukup tinggi) dari target penerimaan yang direncanakan
75% - 100%	Mempunyai tingkat kesulitan relatif rendah dari target penerimaan yang direncanakan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini merupakan bagian yang menyajikan dan menguraikan sejauhmana aplikasi model PAM dalam analisis Elastisitas Dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Sumber Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman Periode 1994 - 2003 berdasarkan pengujian empiris. Akan tetapi, sebelum sampai kepada analisis tersebut terlebih dahulu akan dipaparkan rangkaian hasil pengujian empiris mengenai validasi asumsi OLS (*ordinary least square*), yang biasa disebut asumsi klasik (uji otokorelasi, hetroskedastisitas, dan uji multikolinieritas). Kemudian diikuti hasil estimasi model dengan diawali pengujian statistik (uji-t, uji- F) dan perhitungan R^2 .

Pengujian Validasi Asumsi Klasik

a. Autokorelasi

Hasil pengujian otokorelasi berdasarkan *Durbin-Watson test* dapat diamati pada Tabel 1. Pada model penelitian menggunakan model PAM (*partial adjustment model*) yang mengandung *lagged dependent variable* yaitu X_{t-1} . Nerlove dan Wallis (1966) telah membuktikan bahwa jika *Durbin-Watson test* diaplikasikan pada model *autoregresif* tersebut, maka *D.W statistics* secara *asymptotic* akan bias mendekati nilai 2. Untuk mengatasi masalah ini, maka Durbin (1970) mengemukakan dengan *h statistics*. (Sritua, 1992, hlm. 15)

Tabel 1.
Asumsi OLS : Ringkasan Hasil Uji Otokorelasi Terhadap Model

Model	Dw-test (d)	Dw-test (h)	Dw-tabel 5%	Ho: *)	Otokorelas i
Model 1 (Pajak Daerah)	2.078	-0.133	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada
Model 2 (Retribusi Daerah)	2.237	-0.136	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada
Model 3 (PAD)	2.410	-0.702	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada
Model 4 (Laba Daerah)	2.849	-1.404	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada
Model 5 (Penerimaan Dinas)	2.261	-0.396	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada
Model 6 (Penerimaan Lain)	2.498	-0.644	-1.96 < h < 1.96	diterima	tidak ada

Sumber : Pengolahan data

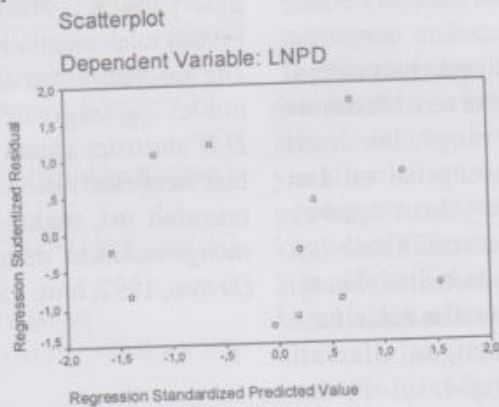
Catatan : *) Uji Ho: Dengan h-statistics test karena autoregresif, rumus dapat dilihat di buku.

Dari olah data pada tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa semua model yang diestimasi tidak ada otokorelasi, yaitu dengan ditunjukkan oleh nilai *h-statistics* antara -1.96 dan 1.96 (*Z-tabel*), hipotesis H_0 menyatakan bahwa tidak terdapat *frist order autocorrelation* diterima, sehingga tidak mengandung autokorelasi dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain atau dengan kata lain variabel gangguan tidak random.

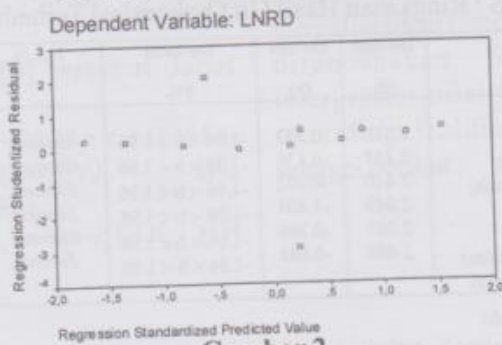
b. Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas sehingga model kurang valid. Dari amatan dalam gambar scetterplot model 1 pajak daerah (Gambar 1) di bawah menunjukkan bahwa gambar tidak menunjukkan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1.
Scatterplot Model 1 (Pajak Daerah)
Scatterplot



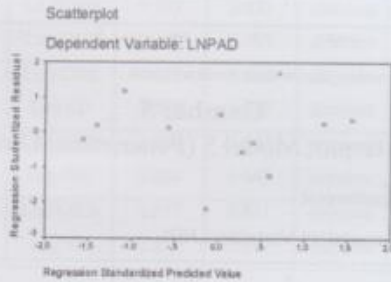
Gambar 2.
Scatterplot Model 2 (Retribusi Daerah)

Pada model 2 Retribusi Daerah (Gambar 2) menunjukkan adanya pola yang agak sedikit jelas, serta titik-titik menyebar di atas lebih banyak dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga sedikit terjadi heteroskedastisitas.

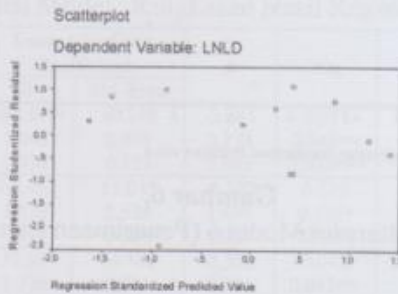
Namun demikian dalam penelitian ini tidak dilakukan perbaikan atau

transformasi data karena pola titik-titik yang tergambar masih kurang jelas.

Pada model 3 Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.



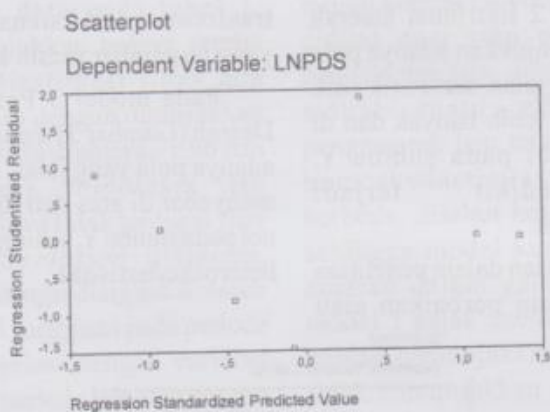
Gambar 3.
Scatterplot Model 3 (Pendapatan Asli Daerah)



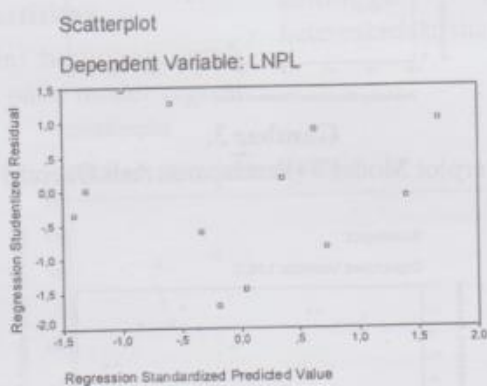
Gambar 4.
Scatterplot Model 4 (Laba Daerah)

Pada model 4 Laba Daerah (Gambar 4) menunjukkan tidak adanya pola yang yang jelas juga, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada model 5 Penerimaan Dinas (Gambar 5) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas juga, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 5.
Scatterplot Model 5 (Penerimaan Dinas)



Gambar 6.
Scatterplot Model 6 (Penerimaan Lain)

Pada model 6 Penerimaan Lain (Gambar 6) menunjukkan tidak adanya pola yang jelas lagi, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas berdasarkan pendekatan toleransi (TOL) dan faktor inflasi varians (VIF) dengan perhitungan komputer program

SPSS 11.0 dapat diketahui seperti pada Tabel 2. Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa, pada model 1 hingga model 6 tidak terjadi penolakan terhadap H_0 atau H_0 diterima, dengan demikian mengindikasikan bahwa pada persamaan tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinieritas.

Tabel 2.

Asumsi OLS : Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas pada Model 1 – 6 Menggunakan Metoda Toleransi (TOL) dan Faktor Inflasi Varians (VIF)

Model	Variabel Terikat	Variabel Bebas	TOLi	VIFi	Ho :	Kesimpulan
Model 1	Ln PD	Ln PDRB	0.168	5.968	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag PD	0.168	5.968	diterima	tidak ada multikolinieritas
Model 2	Ln RD	Ln PDRB	0.705	1.419	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag RD	0.705	1.419	diterima	tidak ada multikolinieritas
Model 3	Ln PAD	Ln PDRB	0.197	5.081	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag PAD	0.197	5.081	diterima	tidak ada multikolinieritas
Model 4	Ln LD	Ln PDRB	0.257	3.887	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag LD	0.257	3.887	diterima	tidak ada multikolinieritas
Model 5	Ln PDS	Ln PDRB	0.609	1.643	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag PDS	0.609	1.643	diterima	tidak ada multikolinieritas
Model 6	Ln PL	Ln PDRB	0.277	3.611	diterima	tidak ada multikolinieritas
		Lag PL	0.277	3.611	diterima	tidak ada multikolinieritas

Sumber : Pengolahan data

Hasil Estimasi Model Regresi

Tabel 3.

Estimasi Model : Ringkasan Hasil Regresi Model

Model	Variabel	Unstandardized Coefficient		t	Sig	F	Sig	R ²
		B	Std. Error					
Model 1	Contanta	-38.818	17.246	-2.251	0.051	197.098	0.000	0.978
	Ln PDRB	2.048	0.901	2.274	0.049***			
	Lag PD	0.738	0.123	5.999	0.000****			
Model 2	Contanta	-67.452	51.035	-2.322	0.219	3.449	0.077	0.434
	Ln PDRB	3.679	2.539	1.449	0.181*			
	Lag RD	0.336	0.320	1.051	0.320			
Model 3	Contanta	-33.661	14.185	-2.373	0.042	208.053	0.000	0.979
	Ln PDRB	1.776	0.751	2.364	0.042***			
	Lag PAD	0.784	0.114	6.869	0.000****			
Model 4	Contanta	-67.330	26.071	-2.583	0.030	67.552	0.000	0.938
	Ln PDRB	3.474	1.326	2.620	0.028***			
	Lag LD	0.575	0.165	3.485	0.007****			
Model 5	Contanta	-79.760	38.595	-2.067	0.108	9.363	0.031	0.824
	Ln PDRB	4.164	1.948	2.138	0.099**			
	Lag PDS	0.453	0.284	1.598	0.185*			
Model 6	Contanta	-26.299	56.237	-0.468	0.651	15.953	0.001	0.780
	Ln PDRB	1.347	2.855	0.472	0.648			
	Lag PL	0.874	0.341	2.561	0.031***			

Sumber : Pengolahan data

- * = Signifikan pada derajat kepercayaan 20%
- ** = Signifikan pada derajat kepercayaan 10%
- *** = Signifikan pada derajat kepercayaan 5%
- **** = Signifikan pada derajat kepercayaan 1%

a. Model 1 :

Dari olah data menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel $PDt-1$ sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PD (Pajak Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PD_{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.978 mengindikasikan bahwa hanya 97,8% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PD_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 2,2%.

b. Model 2 :

Dari olah data menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel $PDt-1$ kurang menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel RD (Retribusi Daerah) dengan derajat kesalahan yang relatif tinggi yaitu 20%. Pada uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan $RDt-1$) mempengaruhi variabel terikat dengan kurang menyakinkan juga dengan derajat kesalahan 10%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.434 mengindikasikan bahwa hanya 43,4 % keragaman nilai atau variasi variabel terikat (RD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan RD_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 56,6%. Hal ini terlihat bahwa masih terdapat variabel di luar model yang banyak mempengaruhi variasi variabel terik

c. Model 3 :

Dari tersebut di atas model 3 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PAD_{t-1} sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PAD_{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.979 mengindikasikan bahwa hanya 97,8% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PAD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PAD_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 2,1%. Angka tersebut merupakan angka terbesar dari semua model yang ada, berarti secara nyata di Kabupaten Sleman Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh PDRB daerah yang merupakan nilai produksi yang dihasilkan di Sleman.

d. Model 4 :

Dari tersebut di atas model 4 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel LD_{t-1} sangat menyakinkan atau signifikan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel LD (Laba Usaha Daerah) dengan derajat kesalahan 5% dan 1%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan LD_{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.938 mengindikasikan bahwa hanya 93,8% keragaman nilai

atau variasi variabel terikat (LD) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan LD_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 6,2%.

e. Model 5 :

Dari tersebut di atas model 5 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD dan variabel PDS_{t-1} kurang menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PDS (Penerimaan Dinas-dinas) dengan derajat kesalahan 10% dan 20%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PDS_{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 5%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.824 mengidikasikan bahwa hanya 82,4% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PDS) dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PDS_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 17,6%.

f. Model 6 :

Dalam model terakhir model 6 menunjukkan bahwa secara partial variabel PDRD tidak menyakinkan mempengaruhi variabel yang diestimasi yaitu variabel PL (Penerimaan Lain), sedangkan variabel lag PL berpengaruh dengan derajat kesalahan 5%. Untuk uji-F menunjukkan bahwa secara serentak variabel bebas (PDRB dan PL_{t-1}) mempengaruhi variabel terikat dengan sangat menyakinkan pada derajat kesalahan 1%. Dilihat dari angka R^2 sebesar 0.78 mengidikasikan bahwa hanya 78% keragaman nilai atau variasi variabel terikat (PL)

dipengaruhi oleh variabel bebas (PDRB dan PL_{t-1}), dan variabel diluar variabel bebas sebesar 22%.

Analisis Elastisitas dan Tingkat Kesulitan Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini menggunakan formulasi *Adjustment Equation Model* yang digunakan untuk mengetahui koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian yang diadaptasikan untuk mengetahui tingkat kesulitan realisasi sumber penerimaan pada struktur keuangan daerah, dan dapat diketahui pula tingkat keterlambatan pungutan. Seperti pada bab 3 bahwa, spesifikasi model awal adalah sebagai berikut :

$$\ln T = \ln K + E \ln Y$$

Dimana :

T = Penerimaan pajak

Y = PDRB

K = Konstanta

E = Koefisien elastisitas

Kemudian disesuaikan dalam bentuk PAM menjadi :

$$\ln R_t = \ln a_0 + a_1 \ln Y_t + a_2 \ln R_{t-1}$$

Dimana :

$$a_2 = 1 - k$$

$$k = 1 - a_2 \text{ (koefisien penyesuaian/ tingkat kesulitan)}$$

Nilai k antara $0 \leq k \leq 1$

Dengan demikian dari persamaan tersebut diperoleh nilai koefisien elastisitas (a_1) dan nilai *adjustment equation* (koefisien penyesuaian) k atau disebut tingkat kesulitan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan

penerimaan keuangan daerah. Nilai koefisien elastisitas (a_1), yang diartikan sebagai perubahan penerimaan sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan perubahan pendapatan regional (PDRB).

Dari perhitungan olah data di atas (tabel 3), dapat diperoleh informasi nilai $E(a_1)$ atau koefisien elastisitas dan nilai $k = 1 - a_2$ yang disebut nilai tingkat kesulitan sebagai berikut :

Tabel 4
Koefisien Elastisitas dan Koefisien Penyesuaian

Model	Koefisien Elastisitas		Nilai a_2	Koefisien Penyesuaian	
	Nilai $E(a_1)$	Kualifikasi		Nilai $k = 1 - a_2$	Tingkat Kesulitan
Model 1	2,048 > 1	Elastis	0,738	0,262	Relatif sangat tinggi
Model 2	3,679 > 1	Elastis	0,336	0,664	Relatif cukup tinggi
Model 3	1,776 > 1	Elastis	0,784	0,216	Relatif sangat tinggi
Model 4	3,474 > 1	Elastis	0,575	0,425	Relatif sangat tinggi
Model 5	4,164 > 1	Elastis	0,453	0,547	Relatif cukup tinggi
Model 6	1,347 > 1	Elastis	0,874	0,126	Relatif sangat tinggi

Sumber : Pengolahan Data (Lampiran 1-6)

Dari tabel 4. tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman dalam parameter pengukuran tingkat elastisitas dalam semua model menunjukkan $E > 1$ atau *elastis* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *semakin berkurang*, dengan asumsi terdapat pertumbuhan ekonomi (PDRB) atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB. Juga menunjukkan struktur tarif penerimaan daerah yang progresif, sehingga jika PDRB daerah di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang signifikan maka ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang, dan sebaliknya.

Namun demikian jika dilihat dari parameter pengukuran tingkat kesulitan menunjukkan bahwa koefisien $k \leq 0$,

atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan relatif tinggi, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah, atau dengan pengertian yang sama ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang *relatif semakin bertambah dan besar*. Juga menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik.

Dari dua koefisien tersebut antara koefisien elastisitas dan koefisien penyesuaian menunjukkan kondisi yang kontradiktif, satu sisi sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Sleman sangat responsif terhadap perubahan PDRB, tetapi pada sisi yang lain menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah masih kurang baik. Dari kondisi tersebut peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membuat suatu

kebijakan yang berpihak pada kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum, adalah sebagai berikut :

1. Dalam estimasi model yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa semua model menunjukkan kondisi yang hampir sama yaitu, variabel bebas (PDRB dan lag variabel penerimaan daerah) baik secara partial maupun simultan mempengaruhi variabel tidak bebas (variabel penerimaan daerah) secara signifikan. Juga variasi perubahan variabel tidak bebas ditentukan oleh variabel bebas dengan prosentase yang cukup tinggi dengan rata-rata di atas 80%, kecuali model 2 yang relatif rendah.
2. Analisis tingkat elastisitas di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa, tingkat elastisitas dalam semua model menunjukkan $E > 1$ atau *elastis* artinya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat atau dana perimbangan dalam jangka panjang relatif *semakin berkurang*, dengan asumsi terdapat pertumbuhan ekonomi (PDRB) atau dengan pengertian yang sama sistem penerimaan sumber keuangan daerah sangat responsif terhadap perubahan PDRB.
3. Pada analisis tingkat kesulitan realisasi penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman dapat

disimpulkan bahwa, koefisien $k \geq 0$, atau mendekati nol artinya tingkat kesulitan *relatif tinggi*, karena tidak dapat merealisasikan rencana penerimaan sumber keuangan daerah dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan administrasi penerimaan keuangan daerah relatif kurang baik. Sehingga hipotesa dalam BAB II nomor 2 tidak terbukti.

Saran-saran

Dengan mencermati beberapa kesimpulan di atas peneliti dapat membuat saran-saran yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari potensi penerimaan keuangan daerah yang sangat responsif dan progresif terhadap perubahan PDRB daerah, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di era otonomi daerah sekarang ini diperlukan adanya akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu dengan meningkatkan dan pengembangan investasi daerah.
2. Mencermati tingkat kesulitan realisasi penerimaan keuangan daerah yang relatif tinggi, sehingga tidak dapat mencapai target yang diharapkan, maka pemerintah daerah hendaknya melakukan pembenahan di birokrasi yang berkaitan dengan keuangan daerah terutama meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang ada untuk bekerja lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Amiruddin, 1992, *Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of the Inpres Project on Indonesian Development*, Disertasi S-3 di University of Pennsylvania, tidak dipublikasikan.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Sebuah Tinjauan Umum*, Penerbit UI press, Jakarta.
- Gemmell, Norman, 1994, Editor, *Ilmu Ekonomi Pembangunan Beberapa Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Mansfield, Charles, 1972, *Elasticity and Bouyancy of Tax System: A Method Applied to Paraguay*, Dalam Internasional Monetary Fund Staff Paper, Vol XII July.
- Mera, Koichi, 1975, *Income Distribution and Regional Development*, University of Tokyo Press, Jepang.
- Sritua Arief, 1993, *Metode Penelitian Ekonomi*, UI-PRESS, Jakarta.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997, "Decentralization and Macroeconomics Management", IMF Working Paper.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Yuyun Wirasmita, 1982, *Elasticity of Tax Syastem A Medel Applied to Indonesia for The Period 1974/75 – 1979/80*, Universitas Padjadjaran, Pemberitaan No. 13 Agustus, Bandung.
- _____, (1994), *Analisis Kelayakan dan Dampak Makro RAPBN 1994/1995*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung.